




# DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO




## RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2021 - 2026



 @diskominfo\_wsb

 @diskominfo.wsb

 @diskominfo.wsb

ALAMAT: JL. SABUK ALU NO. 02 A  
TELP: (0286) 325112 / FAX 325115

WEBSITE : [diskominfo.wonosobokab.go.id](http://diskominfo.wonosobokab.go.id)  
EMAIL : [diskominfo@wonosobokab.go.id](mailto:diskominfo@wonosobokab.go.id)



wonosobo  
The soul of java

## **KATA PENGANTAR**

Perencanaan merupakan, suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Dalam kerangka waktu pencapaian tujuan, perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Tahunan, yang masing-masing harus selaras satu dengan yang lain dan memiliki program yang berkesinambungan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo lahir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang disahkan pada tanggal 8 November 2016. Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun rencana strategis untuk kegiatan lima tahun kedepan, maka Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo menyusun Restra Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026. Penyusunan renstra tersebut berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026. Setelah ditetapkannya renstra ini, maka renstra harus menjadi acuan dalam menyusun kegiatan tahunan yang dituangkan dalam bentuk dokumen RENJA, sehingga visi – misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2026 bisa diwujudkan.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran serta masukan demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo sangat kami harapkan. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kontribusinya dalam penyusunan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wonosobo, Agustus 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WONOSOBO

**EKO SURYANTORO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196310261991031004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II     GAMBARAN LAYANAN SKPD</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	9
2.1.1 Tugas .....	9
2.1.2 Fungsi .....	13
2.1.3 Struktur Organisasi SKPD .....	15
2.2 Sumber Daya SKPD	17
2.2.1 Sumber Daya Manusia ( SDM ) .....	17
2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana .....	18
2.2.3 Sumber Daya Lain-lain .....	18
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	20
2.4 Tantangan dan Peluang .....	25
<b>BAB III    ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	30
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	33
3.3 Telaahan Renstra K / L dan Renstra SKPD ...	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	41
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	43
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ...	45

<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	47
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	50
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	59
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Penyusunan Renstra .....	4
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Gender ....	17
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan	17
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon	18
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan	18
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 – 2021 ..	21
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 – 2021	23
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan .....	31
Tabel 3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026 dengan Renstra Dinas Kominfo 2021-2026 .....	33
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..	35
Tabel 3.4 Keterkaitan Antara Sasaran Strategis Kementrian Kominfo Dengan Program Kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo .....	39
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	46
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 .....	47
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Bidang Urusan Pemerintah Daerah .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo .....	16
Gambar 2. Keterkaitan Dokumen Renstra Dinas Kominfo dengan dokumen Perencanaan lain ...	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika ) Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Sesuai dengan amanat Perda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika ditunjuk untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik. Sebelum ditetapkannya Perda tersebut, urusan komunikasi dan informatika diampu oleh Dinas Perhubungan dengan nama Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika, Urusan Statistik diampu oleh BAPPEDA dan Urusan Persandian diampu oleh Bagian Komunikasi dan Telematika Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk mensukseskan Visi Pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”.

Dalam rangka mencapai visi tersebut dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi yaitu :

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata; dan
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya RPJMD tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Rencana Strategis (RENSTRA)

2021 - 2026 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan setiap tahun dalam rentang waktu tersebut.

Dari ke 5 (lima) misi tersebut, program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung untuk mewujudkan **misi 1 (satu), yaitu mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, lebih tepatnya pada tata kelola pemerintahan, percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.**

Memasuki dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, tak terkecuali dalam proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dituntut untuk aktif mengadaptasi dan memfasilitasi proses akselerasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) disegala sektor. Hal tersebut dilakukan guna terciptanya peningkatan efisiensi dan efektifitas dibidang pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat agenda reformasi birokrasi.

Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk membangun sistem informasi, baik layanan informasi internal pemerintahan maupun layanan informasi dan komunikasi publik yang terintegrasi (Urusan Komunikasi dan Informatika), membangun pusat data sektoral (Urusan Statistik) dan mengamankan segala jenis informasi (urusan Persandian) yang ada dari kemungkinan dilakukannya manipulasi oleh pihak lain.

Harapan dari ini semua tidak lain adalah terwujudnya visi dan misi Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

#### 1.1.1 Pengertian Renstra

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan, tentu memerlukan informasi yang akurat, mudah dan cepat diakses. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara manajemen pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi pemerintah. Hal ini secara Teknis TIK mudah dilaksanakan, tetapi pada implementasinya faktor non teknis menjadi kendala.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja, dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021 - 2026.



### 1.1.2 Proses Penyusunan Renstra

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan pertahun selama kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra selain mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, telah dilakukan proses yang berkelanjutan mulai dari perencanaan hingga diperoleh rumusan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun jadwal kegiatan penyusunan renstra adalah sebagai berikut :

Tabel I.1  
Jadwal Penyusunan Renstra

NO	Kegiatan	Bulan Maret		Bulan April				Bulan Mei				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD											
2.	PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD											
3.	PENYAMPAIAN RANCANGAN RENSTRA SKPD											
4.	VERIFIKASI RANCANGAN RENSTRA SKPD											



kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selama pelaksanaan RPJMD 2021 - 2026.

2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
3. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis yang menjadi landasan penyusunan program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yaitu sebagai bentuk komitmen organisasi dalam pencapaian kinerja sekaligus sebagai pedoman untuk :

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran Tahunan;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahunan anggaran selama lima tahun kedepan;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Renstra adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

#### **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAK**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN LAYANAN SKPD**

Gambaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tertuang dalam 2 (dua) Peraturan Bupati, yaitu Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

##### **2.1.1 Tugas**

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

##### **a. Kepala Dinas**

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah melalui Kepala Dinas.

##### **b. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pengkoordinasian, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, pengorganisasian, ketatalaksanaan, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum, data, informasi dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat.

##### **c. Bidang Informatika**

Bidang Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Informatika mempunyai tugas merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, evaluasi serta pelaporan di bidang informatika yang meliputi teknis komunikasi jaringan dan persandian,

aplikasi telematika, tata kelola IT dan kemitraan.

**d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik.

**e. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan menjalankan fungsi kesekretariatan di bawah koordinasi Sekretaris Dinas. Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Sub Bagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum, kepegawaian dan keuangan meliputi pengelolaan tata usaha kantor, pengorganisasian, penatalaksanaan, umum, kepegawaian dan administrasi keuangan.

**f. Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menjalankan fungsi kesekretariatan dibawah koordinasi Sekretaris Dinas. Sub Bagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

**g. Seksi Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian**

Seksi Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah koordinasi Kepala Bagian Informatika. Secara umum Seksi Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang bidang Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian yang meliputi Layanan Infrastruktur dasar data center, Disaster recovery center, pengembangan intranet dan akses internet dan layanan keamanan informasi.

**h. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Telematika**

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah koordinasi Kepala Bagian Informatika. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, mengkoordinasikan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi telematika yang meliputi Manajemen Data dan informasi, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic dan spesifik, interoperabilitas data dan Integrasi layanan publik dan pemerintahan.

**i. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kemitraan**

Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kemitraan berada di bawah koordinasi Kepala Bidang Informatika. Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penyelenggaraan ekosistem Wonosobo Smart Regency, Government Chief Information Officer (GCIO) Pemkab, Pengembangan SD TIK Pemkab dan masyarakat, pengeloaan domain dan sub domain serta kemitraan.

**j. Seksi Pengelolaan Informasi Publik**

Seksi Pengelolaan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah koordinasi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 22 ayat (1) huruf a, seksi ini mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi/bidang pelayanan informasi publik yang meliputi pengolahan opini publik, penyediaan konten informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, dan penyediaan akses informasi publik.

**k. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial**

Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial berada dibawah koordinasi Kepala Bidang Informasi dan Komuikasi Publik. Sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 22 ayat (1) huruf b, seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan komunikasi social yang meliputi pengelolaan opini publik, aduan masyarakat, pelayanan informasi publik melalui PPID dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

**l. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Media**

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Media berada di bawah koordinasi Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik. sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 22 ayat (1) huruf c seksi ini mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, mengkoordinasian, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan SDM dan kerjasama yang meliputi pengembangan sumber daya ASN di bidang layanan informasi publik, jurnalistik warga, kerjasama media dan hubungan kehumasan lintas sektoral.

**2.1.2 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi komunikasi publik, dan informatika serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang informasi komunikasi publik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi komunikasi publik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi komunikasi publik dan informatika;
- e. pelaksanaan pelayanan komunikasi dan informatika;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Sedangkan fungsi Sekretariat adalah :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, tausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan informatika di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pengelolaan daya dan informasi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

### **2.1.3 Struktur Organisasi SKPD**

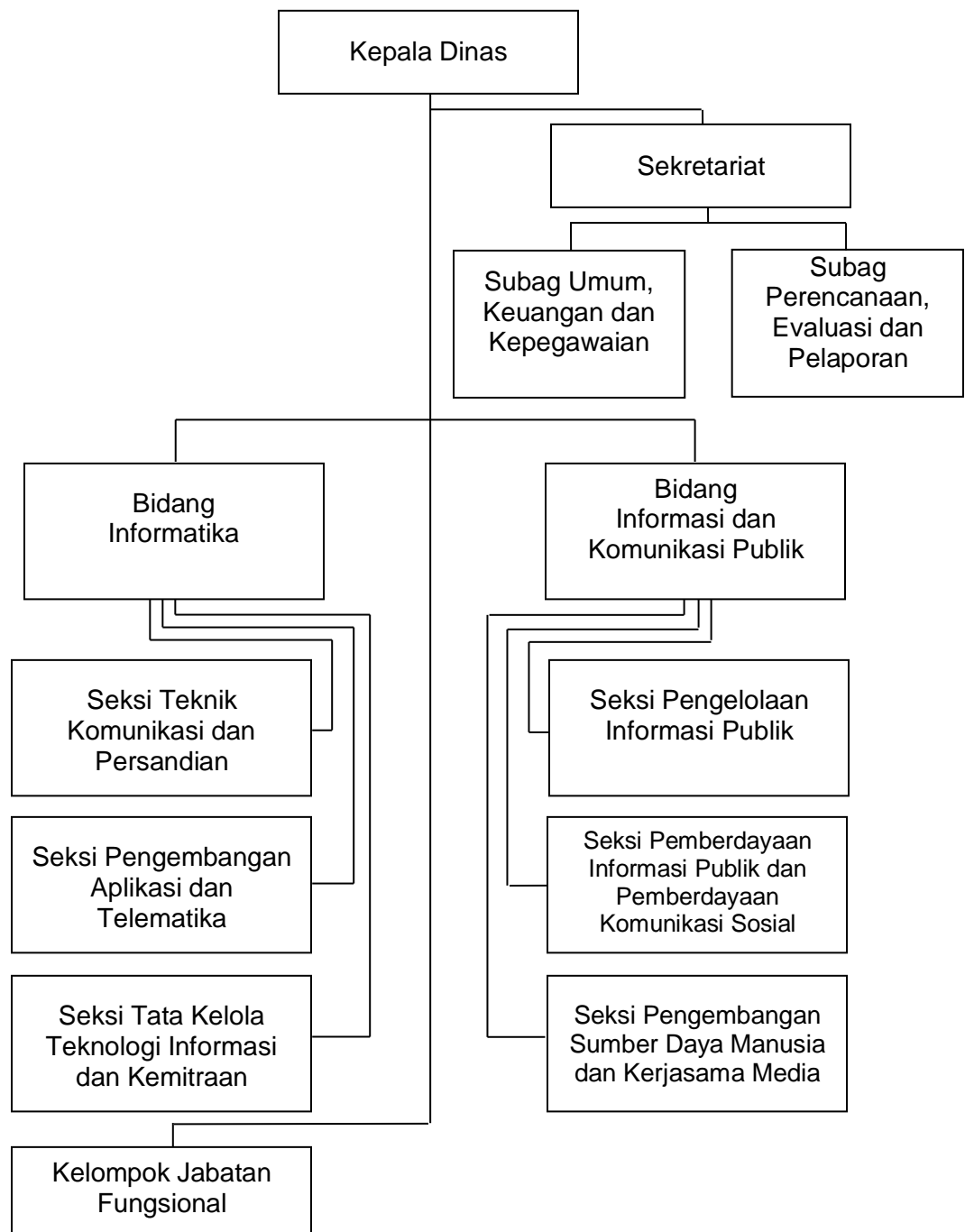
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo terdiri dari;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum , Kepegawaian dan Keuangan



- 2. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Informatika
  - 1. Seksi Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian
  - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Telematika
  - 3. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kemitraan
- d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
  - 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
  - 2. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial
  - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Media
- e. Jabatan Fungsional

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo



## 2.2 Sumber Daya SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo menempati di gedung baru yang dibangun pada tahun anggaran 2019 yang beralamat di Jl Sabuk Alu No 2A Wonosobo.

### 2.2.1 SDM

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo per Mei 2021 adalah sebanyak 20 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Gender

No	Status Kepegawaian	Laki - laki	Perempuan		Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	17	6	40 %	23
2	Pegawai Kontrak	6	0	12,5%	6
Jumlah		23	6	28,5%	29

Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Prosentase
1	IV	3	25%
2	III	16	50%
3	II	4	25%
Jumlah		23	

Tabel 2.3  
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah	Prosentase
1	II	1	5%
2	III	3	15%
3	IV	8	40%
4	Non Eselon	11	40%
Jumlah		20	

Tabel 2.4  
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	S2	3	35%
2	S1	11	25%
3	D III	3	15%
4	SLTA	5	35%
		20	

### 2.2.2 Sumberdaya Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana kerja (perlengkapan) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo kondisi 31 Desember 2020 yang terdiri:

1. Sistem Informasi Manajemen yang meliputi
2. Gedung kantor sebanyak 1 unit yaitu Kantor Induk di Jl. Sabuk Alu No. 2 Wonosobo;
3. Kendaraan dinas sebanyak 13 (tiga belas) unit terdiri dari 3 (tiga) kendaraan roda empat dan 10 (sepuluh) kendaraan roda dua.  
Peralatan kantor terdiri : 25 (duapuluh lima) unit laptop, 32 (tiga puluh dua) unit komputer, 10 (sepuluh) unit printer, unit proyektor, 7 (tujuh) unit kamera, 7 (tujuh) unit sound system dan 4 (empat) unit generator set.

### 2.2.3 Sumber Daya Lain- lain

#### a. Dokumen (Regulasi, Perencanaan dan Pelaporan)

Sejak dibentuk pada tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika sudah membuat beberapa dokumen, baik berupa regulasi (Peraturan Bupati), dokumen perencanaan (Roadmap) maupun dokumen hasil evaluasi dan pelaporan yang bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan Renstra 2021 – 2026.

Dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- Peraturan Bupati tentang Menara Seluler
- Peraturan Bupati tentang SPBE
- Peraturan Bupati tentang LPPL Radio Pesona FM
- Blueprint TIK
- Roadmap TIK

**b. Domain Wonosobokab.go.id**

Domain Wonosobokab.go.id sudah menggunakan protokol *https* yang merupakan *secure version* dari protokol *http*. Sampai dengan tahun 2020 lebih dari 60 aplikasi dan lebih dari 300 website menggunakan domain ini.

**c. Media Informasi dan Komunikasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai beberapa media informasi yang sangat berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik media elektronik, media digital maupun media tradisional, diantaranya adalah :

- LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal)  
Radio “PESONA FM” merupakan satu-satunya LPPL yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, dibawah manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagai salah satu media informasi, Radio PESONA FM sangat dibutuhkan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang belum terjangkau akses internet.
- Wonosobo Electronic Broadcasting TV (WEB TV)  
Merupakan media penyampaian informasi berupa video melalui kanal Youtube resmi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)  
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra pemerintah dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Sampai Tahun 2021 jumlah KIM di Kabupaten Wonosobo telah mencapai 45 kelompok yang tersebar di 15 Kecamatan. Beberapa KIM tersebut bahkan sudah mempunyai dasar hukum berupa Surat Keputusan Kepala Desa, sehingga KIM tersebut dimungkinkan untuk dapat dibiayai dari anggaran desa.
- Media Tradisional (FK METRA)  
Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kelompok kesenian dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat melalui pertunjukan rakyat.
- Website  
Pemerintah Kabupaten Wonosobo mempunyai website utama yang beralamat di wonosobokab.go.id dibawah kendali Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat Daerah, disamping website yang ada di semua OPD.
- Pusat Kendali Bupati  
Pusat kendali bupati merupakan sarana untuk memantau capaian kinerja secara real time melalui aplikasi sistem informasi yang terpadu.
- Jaringan Intranet
- Data Center

- Free wifi
- Jaringan CCTV untuk memantau fasilitas publik

### **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Sebagai gambaran, berikut adalah capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2017-2021.

Tabel 2.5  
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blueprint TIK				50%	55%	60%	65%	X	83,33%	87,50%	87,50%	87,50%	X	166,66%	159,09%	145,83%	134,62%	X
2	Prosentase SKPD yang menerapkan e-goverment				50%	58%	67%	75%	X	100%	100%	100%	100%	X	200,00%	172,41%	149,25%	133,33%	X
3	Persentase penerapan tata naskah dinas elektronik				30%	40%	50%	75%	X	20%	20%	20%	20%	X	66,67%	50,00%	40,00%	26,67%	X
4	Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat				100%	100%	100%	100%	X	100%	100%	100%	100%	X	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	X
5	Persentase media massa nasional yang melakukan MOU dengan pemkab				30%	40%	50%	60%	X	25%	28,57%	35,71%	35,71%	X	83,33%	71,43%	71,42%	59,52%	X
6	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK				43%	45%	47%	50%	X	65,53%	81,62%	82,80%	94,57%	X	152,40%	181,38%	176,17%	189,14%	X
7	Jumlah publikasi data / dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS				5	5	5	5	X	3	3	1	1	X	60,00%	60,00%	20,00%	20,00%	X
8	Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk				25%	30%	35%	40%	X	60%	60%	100%	100%	X	240,00%	200,00%	285,71%	250,00%	X

	administrasi yang diakui BPS																		
9	Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala				80%	85%	90%	100%		58,50%	86,73%	93%	93%		73,13%	102,04%	103,33%	93,00%	
10	Persentase PD yang menyediakan informasi wajib setiap saat				80%	85%	90%	100%		76,10%	85,71%	90%	90%		95,13%	100,84%	100,00%	90,00%	
11	Persentase publikasi data/kajian wajib yang diupdate				80%	85%	100%	100%		100%	100%	100%	83,33%		125,00%	117,65%	100,00%	80,33%!	
12	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan				0,8	0,8	0,8	0,8		1	1	1	1		125,00%	125,00%	125,00%	125,00%	
13	Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian				0,8	0,8	0,85	0,9		1	1	1	1		125,00%	125,00%	117,65%	111,11%	
14	Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian				0,8	0,85	0,9	1		1	1	1	1		125,00%	117,65%	111,11%	100,00%	

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 - 2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antara Anggaran dan Realisasi				Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	418.863.375	516.733.100	744.710.550	699.812.400	397.525.953	497.468.854	619.294.482		94,91%	96,27%	83,16			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	457.793.000	549.470.000	3.685.600.000	25.000.000	402.484.935	530.645.677	3.574.007.750	24.352.000	87,92%	96,57%	96,97%	97,41%		



Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	646.900.000	1.250.000.000	1.370.000.000	549.353.500	618.969.751	1.229.183.250	1.335.273.103	528.372.731	95,68%	98,33%	97,47%	96,18%		
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	0	80.000.000	50.000.000	0	0	63.135.000	49.972.120	0	0	78,92%	99,94%	0		
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	0	195.000.000	130.000.000	24.499.500	0	183.787.500	117.205.909	24.379.500	0	94,25%	90,16%	99,51%		
Program Kerjasama informasi dengan mas media	250.000.000	600.000.000	300.000.000	138.534.000	247.580.000	581.377.875	297.720.000	138.534.000	99,03%	96,90%	99,24%	100%		
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.245.120.732	1.430.000.000	3.640.400.000	2.482.500.000	1.231.870.369	1.322.969.267	2.904.829.075	2.349.935.113	98,94%	92,52%	79,79%	94,66%		
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	278.427.183	100.000.000	150.000.000	3.580.000	240.519.696	82.046.000	117.661.000	3.580.000	86,39%	82,05%	78,44%	100%		
Penyelamatan Data dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	25.000.000	0	0	0	24.780.000	0	0	0	99,12%	0	0	0		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	0	0	0	20.000.000	0	0	0	11.153.400	0	0	0	55,77 %		
Program Pengembangan data/informasi	0	150.000.000	0	0	0	128.145.045	0	0	0	85,43%	0	0		
Jumlah	3.322.104.290	4.871.203.100	10.352.612.450	3.243.467.000	3.163.730.804	4.618.758.468	9.281.094.055		95,23%	94,82%	89,65%			

Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo melakukan upaya untuk mempercepat proses reformasi birokrasi melalui sarana teknologi informasi. Sejak Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika membangun jaringan intranet untuk OPD dalam wilayah kota Wonosobo.

Di bidang Informasi dan Komunikasi Publik, beberapa upaya yang dilakukan antara lain adalah membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati, agar KIM dibentuk melalui SK Kepala Desa, dengan harapan nantinya KIM bisa mendapatkan alokasi dana desa. Pengaduan masyarakat juga diperluas melalui kanal WhatsApp, selain menggunakan website dan sosial media lainnya. Untuk menambah media layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat, pada tahun 2019 dibentuk sebuah media baru yaitu **WebTV (Wonosobo Electronic Broadcasting)**. WebTV mempunyai target dalam satu hari minimal bisa memproduksi 2 (dua) konten yang diupload di kanal **Youtube Official Wonosobo WebTV**.

Sebagai gambaran, beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, antara lain sebagai berikut :

a. Integrasi Aplikasi System Informasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sudah mempunyai kurang lebih 64 sistem informasi yang tersebar di beberapa OPD. Kondisi saat ini belum dilakukan integrasi sistem untuk mendukung terwujudnya *single database* guna mewujudkan program *e-goverment*.

b. Pembangunan infrastruktur jaringan fiber optik

Pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika mengusulkan pembangunan jaringan fiber optik untuk semua OPD. Perkiraan anggaran total untuk pembuatan jaringan ini adalah 3,4 M.

c. Optimalisasi Media Informasi dan komunikasi serta kerjasama dengan media massa.

Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya untuk mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi media informasi dan komunikasi sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat agar segmentasi dan jangkauan wilayah bisa terus diperluas guna pemerataan akses informasi . Media-media tersebut

antara lain :

- Media Elektronik : Website, Media Sosial, Radio, Televisi
- Media Non elektronik : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA), Media Luar Ruang, PPID dll.

Kerjasama dengan media massa, baik media massa lokal, regional maupun nasional terus ditingkatkan untuk memperluas jaringan komunikasi dan informasi. Untuk media massa lokal dan regional berupa kerja sama dengan surat kabar dan tabloid. Sedangkan untuk media massa nasional, selain kerjasama dengan surat kabar, diharapkan ada juga kerjasama dengan stasiun televisi swasta, tergantung dari anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### d. Penataan Menara Telekomunikasi

Pada semester I tahun 2017, terdapat 131 menara *existing* dan 168 *Base Tranceiver Station* (BTS) yang tersebar di 15 kecamatan. Dengan demikian ada beberapa menara *existing* yang di tempati oleh lebih dari satu BTS. Dengan diselesaikannya laporan akhir studi review menara telekomunikasi pada tahun 2017 ini, salah satu poin pentingnya adalah memprioritaskan menara *existing* untuk dijadikan menara bersama, agar dampak negatif berdirinya menara telekomunikasi bisa diminimalisir.

## 2.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan dalam Dinas Informatika dapat dianalisa dengan *menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats)*, yaitu suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dalam suatu kegiatan, baik kegiatan yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan kegiatan baru.

### a. *Strength* (Kekuatan)

#### 1) Kualitas SDM

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas yang baru, tetapi sebagian besar SDM yang ditempatkan dalam Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan personil yang sudah menguasai pekerjaan dalam bidang masing-masing dalam waktu yang relatif lama, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyesuaikan dengan

program dan kegiatan yang baru.

Semangat untuk terus meningkatkan kemampuan masing-masing personil juga menjadi salah satu kekuatan dalam Dinas Komunikasi dan Informatika .

2) Jaringan Kerja

Sebagai instansi yang bertugas untuk mensosialisasikan program-program Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai jaringan komunikasi yang cukup kuat baik internal maupun external.

Jaringan internal adalah jaringan antar instansi, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika membutuhkan materi dari semua instansi untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

Jaringan external merupakan hubungan yang terjalin antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan masyarakat termasuk didalamnya adalah komunitas dan LSM. Jaringan external lebih berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan materi yang diperoleh dari jaringan internal kepada masyarakat.

b. *Weakness* (Kelemahan)

1) Lembaga

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo merupakan Dinas dengan Tipe C yang hanya mempunyai 2 bidang, yaitu Bidang Informatika dan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang didukung oleh kesekretariatan. Dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2016 jelas disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika membawahi 3 urusan, yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik. Selain yang disebutkan diatas ada beberapa urusan/program/kegiatan yang tidak disebutkan dalam Perbup tetapi ditugaskan pada Dinas Komunikasi dan Informatika , seperti yang terdapat dalam rencana kerja Tahun 2018 yaitu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan/ Program Pengembangan data/informasi/ Pengembangan sistem data primer berbasis desa.

Agar tidak terjadi *overload* dalam hal beban kerja, perlu dipertimbangkan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. Dengan

terbatasnya jumlah bidang dan jumlah SDM yang ada sekarang, dikhawatirkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi tidak maksimal dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD 2016-2021.

Lokasi kantor yang kurang representatif dan kurang *eyecatching* juga menjadi salah satu hambatan untuk melakukan *branding* kepada masyarakat.

Ada dua lembaga yang berada dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang belum bisa digabung menjadi satu lokasi, yaitu Data Center yang menjadi pusat kendali data dan aplikasi system informasi serta Radio Pesona FM yang merupakan satu-satunya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Idealnya lembaga ini menjadi satu lokasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika , khususnya untuk mempermudah dalam hal koordinasi teknis.

2) Anggaran

Walapun Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu dinas yang diprioritaskan termasuk dalam penggunaan anggaran, tetapi kemampuan APBD yang terbatas juga menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan kegiatan yang telah disusun.

3) Sarana Prasarana

Sebagai dinas baru, sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat minimalis, terutama sarana prasarana operasional di kantor. **Media Center** yang menjadi kebutuhan pokok juga belum tersedia. Sarana prasarana yang berada di luar kantor seperti data center, stasiun radio, media informasi luar ruang, infrastruktur jaringan komunikasi juga masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

c. *Opportunities* (Kesempatan)

1) Dinas Prioritas

Sebagai dinas yang baru dan sangat diharapkan kontribusinya dalam pengembangan bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dinas yang mendapatkan prioritas dalam hal alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah. Hal ini harus bisa

dimanfaatkan secara maksimal untuk menyusun kekuatan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.

2) Perubahan Type Dinas

Peraturan Menteri Komunikasi dan Komunikasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, pasal 15 menyebutkan bahwa *tipologi* Dinas Komunikasi dan Informatika bisa Type A, Type B atau Type C.

Dalam Pasal 21 peraturan yang sama disebutkan, bahwa Tipologi Dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.

Seperti sudah disebutkan diatas bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika membawahi 3 urusan, yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian serta Urusan Statistik.

Selaras dengan hal tersebut, sangat dimungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika dinaikkan dari Dinas Type C menjadi Dinas Type B.

3) Pengembangan Kapasitas SDM Stakeholder

Dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, terdapat 6 strategi yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis e-Government. Salah satu strategi itu adalah dengan mengembangkan kapasitas SDM.

Dengan dibuatnya aplikasi sistem informasi, yang salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan, kemampuan operasional komputer dasar harus dimiliki oleh setiap orang guna mengakses aplikasi yang tersedia.

Selain pengembangan kapasitas SDM di bidang IT, pengembangan kapasitas SDM bidang informasi dan komunikasi juga tidak kalah penting, karena bidang inilah yang akan menginformasikan apa yang menjadi *output* dari bidang informatika.

d. *Threats* (Ancaman)

- 1) Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat  
Seperti kita ketahui bersama, kemajuan di bidang teknologi informasi berjalan dengan sangat cepat. Pengadaan sarana teknologi informasi harus dilakukan dengan pemilihan spesifikasi yang tepat dan mempertimbangkan proyeksi waktu penggunaan sarana tersebut.
  
- 2) Kondisi geografis daerah  
Secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak diketinggian antara 250 s.d 2.250 diatas permukaan laut. Selain termasuk dalam wilayah pegunungan, beberapa wilayah di Kabupaten Wonosobo juga merupakan daerah rawan bencana yang menjadi ancaman terhadap keberadaan infrastruktur teknologi informasi.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika . Sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang berkaitan dengan dinamika diluar organisasi Perangkat Daerah misalnya Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun masyarakat. Berikut adalah identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
1	Implementasi Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal	Pelaksanaan domain pendukung SPBE belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua aplikasi terintegrasi</li> <li>- Belum mempunyai Proses Bisnis SPBE</li> <li>- Layanan Publik belum Optimal</li> <li>- Pusat Data belum berfungsi optimal</li> <li>- Belum semua OPD terhubung jaringan intranet</li> </ul>	Nilai index domian SPBE
2	Kanal-kanal informasi yang disiapkan oleh	PPID Pembantu di tiap Perangkat Daerah belum	Sumber daya manusia yang menangani	Penilaian Keterbukaan Informasi



	Pemerintah Daerah belum dioptimalkan sepenuhnya oleh Perangkat Daerah selaku PPID Pembantu yang memiliki informasi Program dan Kebijakan di tiap Perangkat Daerah	sepenuhnya mampu mengelola informasi publik	PPID Pembantu belum sepenuhnya mampu mengelola informasi publik dan sebagian besar masih "part time" sehingga menyulitkan untuk melakukan update data	Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
3	Kanal-kanal informasi publik yang disiapkan Pemerintah Daerah masih belum menarik untuk dijadikan sumber informasi publik publik	Konten-konten yang dimiliki di tiap kanal-kanal yang disiapkan Pemerintah Daerah masih belum menarik untuk publik dan belum bisa menampilkan isu strategis yang menarik dan dibutuhkan oleh masyarakat	Masih terbatasnya sumber informasi yang diterima	Penilaian Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
4	Kehumasan belum diberi peran secara maksimal	Kehumasan dalam sebuah organisasi baik pemerintah maupun sosial kemasyarakatan masih dianggap kurang begitu penting, sehingga dalam pengelolaanya kurang optimal	Kurangnya informasi dan pemahaman terkait ilmu kehumasan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal dan sumber media informasi lainnya	

5	Kurang rapinya pengarsipan	Manajemen dokumentasi dan pengarsipannya belum terkelola dengan baik dan benar	Belum adanya SOP dan sarana prasarana yang memadai	
6	Resiko dan kerawanan keamanan data dan informasi	Pengelolaan keamanan data dan informasi belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarpras pendukung keamanan belum lengkap</li> <li>- SDM pengelola khusus keamanan Informasi belum ada</li> <li>- Belum dilaksanakan audit keamanan informasi secara berkelanjutan</li> </ul>	Indeks KAMI
7	Data statistik sektoral belum terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian besar data masih berada dalam perangkat daerah masing – masing</li> <li>- Data yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan</li> <li>- Belum ada tenaga khusus pengelola statistik sketoral di OPD</li> </ul>	Kedisiplinan perangkat daerah untuk mengupload data di portal yang sudah disediakan	Data statistik sektoral

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan naskah RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026, Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai **“Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”** .

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk mencapai visi tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menjabarkan 5 ( lima ) misi dalam RPJMD. Dari misi – misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berfokus pada misi pertama yaitu *“Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”* khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonosobo.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026 dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2  
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026  
dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026

No	RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026	Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026
	Visi	
	Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera	
	Misi	Program / Kegiatan
1.	Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat	I. Urusan Komunikasi dan Informatika - Program Aplikasi Informatika - Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah

		<p>Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Program Informasi dan Komunikasi Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> </ul> <p>II. Urusan Persandian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> <li>- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi</li> </ul> <p>III. Urusan Statistik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> </ul>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 3.3  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Perangkat Daerah  
 Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah  
 dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat	Implementasi Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target capaian index SPBE</li> <li>- Sudah tersedia dokumen SPBE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua Perangkat Daerah memahami pentingnya SPBE</li> <li>- Adanya penambahan indikator SPBE pada regulasi yang baru</li> <li>- Integrasi aplikasi / data antar Perangkat Daerah belum maksimal</li> </ul>
		Kanal-kanal informasi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah belum dioptimalkan sepenuhnya oleh Perangkat Daerah selaku PPID Pembantu yang memiliki informasi Program dan Kebijakan di tiap Perangkat Daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPID belum menguasai informasi sektoral Perangkat Daerah</li> <li>- Pembaharuan informasi tidak dilakukan secara berkala</li> <li>- Sering terjadi mutasi pegawai selaku PPID</li> </ul>

		Kanal-kanal informasi publik yang disiapkan Pemerintah Daerah masih belum menarik untuk dijadikan sumber informasi publik publik		-
		Kehumasan dalam sebuah organisasi baik pemerintah maupun sosial kemasyarakatan masih dianggap kurang begitu penting, sehingga dalam pengelolaannya kurang optimal	Adanya mitra kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang kehumasan yaitu Bagian Humas dan Promkompim Sekretariat Daerah	Belum optimalnya pengelolaan peran kehumasan
		Manajemen dokumentasi dan pengarsipannya belum terkelola dengan baik dan benar	Sudah ada SDM Arsip di lingkungan Pemda	Belum ada SOP pengarsipan
		Resiko dan kerawanan keamanan data dan informasi	Dokumen keamanan informasi	Belum ada SDM khusus pengelola keamanan informasi
		Data statistik sektoral belum terintegrasi	Sudah tersedia portal satu data	Petugas pengelola data belum disiplin dalam

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo**

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam Renstra tahun 2020 – 2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Seperti tersebut dalam renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020- 2024, bahwa tantangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2020 – 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring);

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sedangkan sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2020 – 2024 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berikut adalah beberapa keterkaitan antara sasaran strategis yang ada pada Kementerian Komunikasi dan Informasi, dengan program kegiatan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.



Tabel 3.4  
Keterkaitan Antara Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan  
Informatika  
Dengan Program Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Wonosobo

No	Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 - 2024	Program Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo
1	Terwujudnya tatakelola pemerintah yang baik	I. Urusan Komunikasi dan Informatika - Program Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	- Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota - Program Informasi dan Komunikasi Publik - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota II. Urusan Persandian - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah

		Daerah Kabupaten/Kota - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi III. Urusan Statistik - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo, juga menjadi acuan dan koridor dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut informasi dan telekomunikasi.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 – 2031, khususnya pasal 19 menjelaskan berbagai hal yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, yaitu sebagai berikut :

- (1). Rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
  - a. pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi; dan
  - b. pengembangan jaringan teknologi informatika.
- (2). Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan jaringan telepon kabel; dan
  - b. pengembangan jaringan telepon nirkabel.
- (3). Pengembangan jaringan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di seluruh kecamatan.

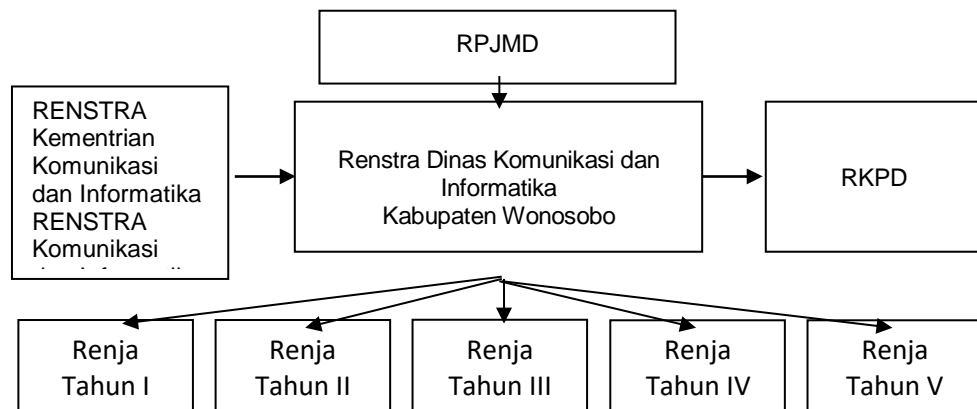
- (4). Pengembangan jaringan telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi.
- (5). Pembangunan menara telekomunikasi dan/atau *Base Transceiver Station* (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penggunaan menara telekomunikasi bersama berada di seluruh kecamatan.
- (6). Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7). Pengembangan jaringan teknologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan sistem jaringan teknologi informasi pendukung kinerja pemerintahan; dan
  - b. optimalisasi Pusat Data sebagai media informasi publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tataruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Adapun keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2. Keterkaitan Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan dokumen Perencanaan lain



### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya untuk menyusun isu-isu strategis, yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Kabupaten Wonosobo jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis sebagai berikut :

- a. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah belum optimal;
- b. Belum optimalnya Informasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah yang diterima publik;
- c. Rendahnya Pemahaman Peran Kehumasan;
- d. Dokumentasi & Arsip belum tertata secara maksimal;
- e. Masih kurangnya Keamanan Data dan Informasi;
- f. Rendahnya Kualitas Data Sektoral.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai.

Sasaran organisasi merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Untuk tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Pada Tahun					
				2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Indeks SPBE	2,94	2,98	2,99	3,0	3,01	3,02
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	93	93,50	93,50	94,00	94	95,0
			Index Smart City	2,95	2,98	3,0	3,1	3,2	3,3
			Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan intranet	58	60	61	63	65	67
			Persentase ketersediaan data sektoral	25	37,5	50	62,5	70	80
			Index KAMI	200	250	300	350	400	450

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Wonosobo. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung terciptanya layanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo  
Tahun 2021-2026

Visi	Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera		
Misi	Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi
			Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada lingkungan Pemerintah Daerah dan ruang publik

		Optimalisasi pelaksanaan E-Government	Pembuatan Dokumen e-Government
			Sosialisasi pentingnya pelaksanaan e-Government kepada Perangkat Daerah
			Evaluasi berkala pelaksanaan e-Government
			Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-government
			Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi bagi Aparatur
		Optimalisasi percepatan pelaksanaan Satu Data	Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam penyusunan data statistik sektoral
			Evaluasi berkala pelaksanaan Satu Data
			Peningkatan kapasitas pengelola statistik sektoral
			Peningkatan kedisiplinan pembaharuan data statistik sektoral di portal satu data



		Optimalisasi Layanan Informasi Publik	Pembuatan SOP Pelayanan informasi publik
			Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan Media Informasi Pemerintah Daerah
			Meningkatkan pengelolaan kanal aduan masyarakat
			Meningkatkan pembinaan dan pemanfaatan jaringan komunikasi sosial dan PPID
			Peningkatan kapasitas bidang komunikasi publik bagi aparatur dan masyarakat
		Optimasilasi keamanan informasi	Peningkatan kapasitas tenaga keamanan informasi
			Peningkatan sarana prasarana keamanan informasi
			Meningkatkan sosialisasi keamanan teknologi informasi dan komunikasi

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif. Disamping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama 5 (lima) tahun.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo mendapat anggaran sebesar Rp 12.823.976.153,00 dan telah dirumuskan Program Kerja sebagai jabaran operasional, sehingga dapat diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya melalui indikator sasarannya. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut :

#### **I. Urusan Komunikasi dan Informatika**

**A. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**, dengan anggaran Rp 7.829.037.442,00 dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1.1 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - 1.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
  - 1.3 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
  - 1.4 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - 1.5 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

- 1.6 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 1.7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
2. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 2.1 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
  - 2.2 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab./Kota
  - 2.3 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

**B. Program Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**, dengan anggaran Rp 4.567.472.641,00, dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1.1 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
  - 1.2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
  - 1.3 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - 1.4 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
  - 1.5 Pelayanan Informasi Publik
  - 1.6 Layanan Hubungan Media
  - 1.7 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi
  - 1.8 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
  - 1.9 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
  - 1.10 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## **II. Urusan Persandian**

**A. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi** dengan anggaran Rp 213.732.935,00 dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 2.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## **III. Urusan Statistik**

**A. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, dengan anggaran Rp 213.732.935,00 dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
  - 1.2 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
  - 1.3 Membangun Metadata Statistik Sektoral

## **IV. Non Urusan**

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan anggaran Rp 21.892.958.902,00 dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Administrasi Keuangan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 2.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 2.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 3.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3.2 Pengadaan Mebel
  - 3.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 3.4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 3.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 3.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 5.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

TABEL 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME IMMEDIATE / OUTPUT), SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RUMUSAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp												
									2019	2020	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.														
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik				Indeks SPBE	Hasil Evaluasi dari KemenPANRB meliputi Nilai Domain Kebijakan Internal, Nilai Domain Tata Kelola SPBE, Nilai Domain Manajemen SPBE, Nilai Domain Layanan SPBE		Angka	2.94	2.94	2.97		2.98		2.99		3		3.01		3.02							Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo					
	a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan			Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kemen PAN-RB didasarkan 5 komponen yaitu : 1). perencanaan kinerja, 2). Pengukuran kinerja, 3). Pelaporan kinerja, 4). Evaluasi internal dan 5). Capaian kinerja.		Nilai			64.50		65.76		66.42		68.64		70.64		72.47							Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo					
	b. Terwujudnya pemerintahan yang kapabel				Indeks SPBE	Hasil Evaluasi dari KemenPANRB meliputi Nilai Domain Kebijakan Internal, Nilai Domain Tata Kelola SPBE, Nilai Domain Manajemen SPBE, Nilai Domain Layanan SPBE		Indeks	2.94	2.94	2.97		2.98		2.99		3		3.01		3.02							Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo					
	c. Menguatnya Transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian dari Komisi Informasi Jawa Tengah		Nilai	83,02	93	93		93.50		94.00		94.5		95		95.5							Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo					
	d. Meningkatnya pelayanan publik	Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor hasil survei pelayanan publik. Indeks ini menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah publik		Indeks			82,00		82.50		83.00		83.5		84		84.5							Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo					
					Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian dari Komisi Informasi Jawa Tengah		Angka	83,02	93	93		93.50		94.00		94.5		95		95.5							Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo					
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika								2,525,000,000		1,831,500,000		1,489,891,707		1,493,018,006		1,503,084,430		1,511,543,299				1,511,543,299	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo						
			Meningkatkan tata kelola informasi dan layanan informasi publik yang inklusif		Indeks SPBE	Hasil Evaluasi dari KemenPANRB meliputi Nilai Domain Kebijakan Internal, Nilai Domain Tata Kelola SPBE, Nilai Domain Manajemen SPBE, Nilai Domain Layanan SPBE		Angka	2.94	2.94	2.97		2.98		2.99		3		3.01		3.02							Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo					
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Dilepaskan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan intranet	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung jaringan intranet/ Jumlah Perangkat Daerah		%	36.00%	52.00%	84.00%		60%		61		63		65		67							Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo					
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen proses business Pemerintah Daerah			Dokumen																				Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo					
				Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) / Jumlah Perangkat Daerah		%			25	2,525,000,000		50	1,829,500,000		75	1,487,891,707		100	1,491,018,006		100	1,501,084,430		100	1,509,543,299	100	1,509,543,299	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo			

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RUMUSAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Peranakat		Unit Kerja Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									2019	2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp
											Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen SPBE	Dokumen SPBE	Masterplan dan Roadmap SPBE	Dokumen		1		15,000,000	1	50,500,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	45,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Facilitasi Datacenter dan Call Center	Facilitasi Datacenter dan Call Center	Operasional, honor, sewa bandwidth	Bulan	12	12	12	900,000,000	12	500,000,000	12	757,000,000	12	760,126,299	12	760,126,299	12	757,952,880	12	757,952,880	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Aset Jaringan dalam kondisi baik	Aset Jaringan dalam kondisi baik / total jumlah aset jaringan	FO, AC Datacenter, HT, Server, Media Center	%		5		1,200,000,000	72	500,000,000	75	466,313,000	78	466,313,000	80	466,313,000	82	474,290,419	82	474,290,419	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo
				Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi									72	400,000,000	75	25,000,000	78	25,000,000	80	25,000,000	82	25,000,000	82	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terimplementasinya aplikasi Generik Pemerintahan	Terimplementasinya aplikasi Generik Pemerintahan / Total aplikasi yang dipakai	Pembuatan dan Pengembangan aplikasi	%		4	2	200,000,000	60	100,000,000	65	25,337,707	70	25,337,707	75	25,337,707	80	31,100,000	80	31,100,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kegiatan pengembangan Smart City	Jumlah FGD pengembangan smart city	Mengikuti Expose Smart City di Jakarta,	angka		2		85,000,000	3	100,000,000	3	65,000,000	3	65,000,000	3	65,000,000	3	65,000,000	3	65,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peningkatan kapasitas SDM bidang TIK	Jumlah pengembangan SDM TIK	Pelatihan IT, Fasilitas RTK	orang		2		60,000,000	6	91,000,000	8	16,241,000	10	16,241,000	11	16,307,424	12	16,200,000	12	16,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Dokumen laporan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan SPBE	Jumlah laporan evaluasi	Dokumen SPBE, Monitoring SPBE, SmartBook e-Government	Dokumen		1		65,000,000	1	88,000,000	1	108,000,000	1	108,000,000	1	98,000,000	1	115,000,000	1	115,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo
				Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internet Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah			%			25		50	2,000,000	75	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo
				Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota												1,000,000		1,000,000				1,000,000		1,000,000		
				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab./Kota																						
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen proses business Pemerintah Daerah			Dokumen							1,000,000		1,000,000					1,000,000		1,000,000		
				<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	Nilai Aksesibilitas Website	Penilaian dari Komisi Informasi Jawa Tengah		Angka	83,02	93	93	2,864,220,000	93.50	1,068,500,000	93.50	869,205,181	94	871,029,069	94	876,901,837	95	861,836,754		861,836,754	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo
					Nilai Informasi Tersedia setiap saat																					
					Nilai Kelembagaan PPD																					

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT IMMEDIATE / OUTPUT), SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RUMUSAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Peranekat		Unit Kerja Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									2019	2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
											Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	OPD dengan tingkat keterbukaan informasi informaf		Angka				1,432,110,000	5		10		20		30		40					Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo	
				Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase kepatuhan terhadap kebijakan pusat	Jumlah Kebijakan Operasional	Pedoman/ standar keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo	angka	-	1 dok	1 dok	80,000,000	1	40,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000		10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo		
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi yang dipublish	Jumlah informasi yang dipublish	Advertorial, Fasilitas LPPL Pesona FM dan WebTV, Media komunikasi luar ruang	Paket	3 paket	3 paket	3 paket	750,000,000	2414	757,952,880	2799	621,356,000	3189	621,356,000	3574	621,356,000	3694	621,356,000		621,356,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo		
							Media luar ruang	Kali				14		14		14		14		14		14				Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo	
							Advertorial melalui media massa	Kali				120		125		125		130		130		130					Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
							Pengelolaan media elektronik					2,280		2,660		3,050		3,430		3,550		3,550					Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
							WebTV	Kali				480		500		530		550		550		550					Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
							Pesona (berita terkait pemerintahan)	Kali				1,800		2,160		2,520		2,880		3,000		3,000					Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
							Rilis berita	kali				100		120		130		140		150		150					Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Monitring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase aduan masyarakat yang diselesaikan	(Jumlah Aduan yang Diselesaikan / Jumlah Aduan Masyarakat) *100%		%				70,000,000	100		100	24,020,000	100	24,020,000	100	24,020,000	100	24,020,000		24,020,000		24,020,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Pelayanan Informasi Publik	Persentase PPID aktif	Jumlah PPID Pembantu aktif/ Jumlah PPID		%	3	3	3	125,000,000	70	87,871,500	75	77,640,000	85	77,640,000	90	77,640,000	100	77,640,000		77,640,000		77,640,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
							Fasilitas penguatan kapasitas PPID	OPD				40		40		40		40		40		40					Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
							Jumlah PPID Desa yang aktif					45		60		80		100		120		120					Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Layanan Hubungan Media	Persentase keterlibatan media sesuai wilayah penugasan	jumlah media yang terlibat/ jumlah media yang ada		%	2	2	2	175,000,000	10	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	15	100,000,000	15	90,000,000		90,000,000		90,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
							Penguatan Kapasitas Media	kegiatan				1		1		1		1		1		1					Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN yang mempunyai sertifikat kompetensi kehumasan	jumlah ASN mempunyai sertifikat		angka	40	40	80	22,110,000	2	15,000,000	4	15,240,000	6	15,240,000	8	15,240,000	10	15,240,000		15,240,000		15,240,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase lembaga komunikasi sosial yang aktif	Jumlah konten yang dihasilkan lembaga komunikasi sosial	Fasilitas kegiatan FK Metra, KIM, content creator dan lembaga komunikasi sosial lainnya	angka		70		100,000,000	12		18	10,000,000	24	10,000,000	30	12,872,768	36	12,872,768		12,872,768		12,872,768	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME IMMEDIATE / OUTPUT), SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RUMUSAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD											Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Peranekat		Unit Kerja Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp							
											Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase terselesainya sengketa informasi publik	Jumlah sengketa informasi publik yang diselesaikan / Jumlah sengketa informasi publik		%	-	1	1	80,000,000	100	20,000,000	100		100	2,000,000	100	5,000,000	100	2,000,000		2,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo							
				Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana Komunikasi Publik dalam kondisi baik	Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi Publik dalam kondisi baik / Jumlah aset komunikasi publik	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Komunikasi Publik dalam kondisi baik	%	-	1	1	30,000,000	25	47,675,620	30	10,949,181	35	10,773,069	40	10,773,069	50	8,707,986		8,707,986	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo							
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data sektoral			%	0.00%	70.00%		60,000,000	75.00%	50,000,000	80.00%	40,674,084	85.00%	40,759,432	90.00%	41,034,246	95.00%	41,265,173		41,265,173	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo							
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang sudah memulakhirkan data sektoral di portal satudata			%				60.00%	50,000,000	61.00%	40,674,084	62.00%	40,759,432	62.00%	41,034,246	62.00%	41,265,173		41,265,173	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo								
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terselenggaranya kegiatan koordinasi sinkronisasi data dengan OPD		OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40,000,000	40 OPD	30,000,000	40 OPD	25,000,000	40 OPD	25,000,000	40 OPD	25,000,000	40 OPD	25,000,000			Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo								
				Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlathnya SDM penyusun data statistik sektoral		OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	20,000,000	40 OPD	10,000,000	40 OPD	10,000,000	40 OPD	10,000,000	40 OPD	10,000,000	40 OPD	10,000,000			Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo								
				Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Sektoral di Portal SatuData		OPD	-	-	5 OPD	50,000,000	10 OPD	10,000,000	15 OPD	5,674,084	20 OPD	5,759,432	25 OPD	6,034,246	25 OPD	6,265,173			Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo								
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Index KAMI		angka	45	-	200	150,000,000	250	50,000,000	300	40,674,084	350	40,759,432	400	41,034,246	450	41,265,173		41,265,173	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo								
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Informasi yang sudah dilaksanakan		%	45			100,000,000	30	25,000,000	50	25,000,000	60	25,000,000	70	25,000,000	80	25,000,000		25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo								
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya kegiatan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Jumlah sistem pengamanan	Pengadaan Sistem Keamanan Informasi	Aplikasi		2	3	100,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000		25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo							
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Data Center Yang Sudah Di Assesment Manajemen Resiko (Jumlah Layanan Data Center	Jumlah Layanan Data Center Yang Sudah Di Assesment Manajemen Resiko (Jumlah Layanan Data Center		%		10	50,000,000	20	25,000,000	30	15,674,084	40	15,759,432	50	16,034,246	60	16,265,173		16,265,173	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo								
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Manajemen Resiko	Jumlah Dokumen	Dokumen/Pedoman manajemen resiko	Dokumen		1	50,000,000	1	25,000,000	1	15,674,084	1	15,759,432	1	16,034,246	1	16,265,173		16,265,173	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo								
							Pembuatan Dokumen Keamanan Informasi	Angka			64.50		65.76		66.42		68.64		70.64		72.47			Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo								
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan		Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Keman PAN-RB didasarkan 5 komponen yaitu : 1). perencanaan kinerja, 2). Pengukuran kinerja, 3). Pelaporan kinerja, 4). Evaluasi internal dan 5). Capaian kinerja.		Angka			82,00		82.50		83.00		83.5		84		84.5			Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo								
		Meningkatnya pelayanan publik	Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	Skor hasil survei pelayanan publik. Indeks ini menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik		Angka			82,00		82.50		83.00		83.5		84		84.5			Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo								
																								Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonorebo								

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME IMMEDIATE / OUTPUT), SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RUMUSAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Peranakat		Unit Kerja Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp								
									2019	2020	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.			Target	RP.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						#####		3,621,471,173		3,621,471,173		4,491,685,164		4,540,288,940		4,589,864,792		4,649,648,833		4,649,648,833	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo				
				Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Jumlah Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik/Jumlah Aset Perangkat Daerah x 100			%			100		100		100		100		100		100				Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo				
				Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Jumlah Sarpras pendukung Kinerja yang terpenuhi / Jumlah Kebutuhan Sarpras Pendukung Kinerja x 100			%			100		100		100		100		100		100				Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo				
				Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran / Jumlah Pelayanan Perkantoran x 100			%			100		100		100		100		100		100				Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo				
				Persentase ketersediaan program renja perangkat daerah dan RKPD	Jumlah PRKPD/Jumlah Progra RKPD sesuai unusan x 100ogram Renja PD yang selaras dengan program			%			100		100		100		100		100		100				Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan gaji dan tunjangan ASN	(Jumlah realisasi anggaran belanja pelayanan administrasi dibagi pagu anggaran) kali 100%		%			3,050,981,424	100	3,012,338,498	100	3,322,632,199	100	3,654,895,420	100	3,837,640,191	100	3,933,581,196			3,933,581,196		3,933,581,196	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Orang/bulan			3,050,981,424		3,012,338,498		3,322,632,199		3,654,895,420		3,837,640,191		3,933,581,196			3,933,581,196		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo			
				Cakupan layanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah realisasi gaji dan tunjangan/Jumlah ASN kali 100	Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	25 ASN x 14 bulan	1,827,781,812	25 ASN x 14 bulan	1,827,781,812	25 ASN x 14 bulan	#####	25 ASN x 14 bulan	1,882,833,940	25 ASN x 14 bulan	2,071,117,335	25 ASN x 14 bulan	2,174,673,202	25 ASN x 14 bulan	2,229,040,032			2,229,040,032		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo			
				Jumlah ASN yaang mendapat Tambahan Penghasilan	Jumlah ASN yaang mendapat Tambahan Penghasilan	Tambahan Penghasilan	orang/bulan	25 ASN x 14 bulan	#####	25 ASN x 14 bulan	1,223,199,612	25 ASN x 14 bulan	#####	25 ASN x 14 bulan	1,439,798,259	25 ASN x 14 bulan	1,583,778,085	25 ASN x 14 bulan	1,662,966,989	25 ASN x 14 bulan	1,704,541,164			1,704,541,164		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo			
				Penyedia jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	(Jumlah realisasi anggaran belanja pelayanan administrasi dibagi pagu anggaran) kali 100%		%			100.00		268,341,887	100.00	277,462,880	100.00	284,377,168	100.00	291,982,885	100.00	300,349,173	100.00	303,452,916		303,452,916		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo		
				Penyedia Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat/Realisasi Anggaran kali 100	Terlaksananya jasa surat menyurat	paket	50 malrai	Rp 500,000	126.00	1,260,000	126.00	6,000,000	126.00	6,600,000	126.00	7,260,000	126.00	7,986,000	126.00	8,784,600			8,784,600		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo		
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik/Jumlah Anggaran kali 100	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	paket	12 bulan	Rp 43,542,806	12 bulan	47,897,087	12 bulan	57,280,000	12 bulan	63,008,000	12 bulan	69,308,800	12 bulan	76,239,680	12 bulan	77,764,474			77,764,474		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo		
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan umum	Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan umum	orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	214,182,880	1 Orang	214,769,168	1 Orang	215,414,085	1 Orang	216,123,493	1 Orang	216,903,843			216,903,843			216,903,843		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo	
						Penyediaan jasa Tenaga Administasi	orang	1 Orang	Rp 25,350,000	1 Orang	25,350,000	1 Orang	25,200,000	1 Orang	25,200,000	1 Orang	25,200,000	1 Orang	25,200,000	1 Orang	25,200,000			25,200,000			25,200,000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
						Penyediaan jasa Kebersihan dan keamanan kantor	orang	2 orang tenaga kebersihan	Rp 50,700,000	2 orang tenaga kebersihan	50,700,000	2 orang tenaga kebersihan	50,400,000	2 orang tenaga kebersihan	50,400,000	2 orang tenaga kebersihan	50,400,000	2 orang tenaga kebersihan	50,400,000	2 orang tenaga kebersihan	50,400,000			50,400,000			50,400,000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
							orang	2 orang tenaga keamanan	Rp 50,700,000	2 orang tenaga keamanan	50,700,000	2 orang tenaga keamanan	50,400,000	2 orang tenaga keamanan	50,400,000	2 orang tenaga keamanan	50,400,000	2 orang tenaga keamanan	50,400,000	2 orang tenaga keamanan			50,400,000			50,400,000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo	
							orang	1 orang tenaga Sopir	Rp 25,350,000	1 orang tenaga Sopir	25,350,000	1 orang tenaga Sopir	25,200,000	1 orang tenaga Sopir	25,200,000	1 orang tenaga Sopir	25,200,000	1 orang tenaga Sopir	25,200,000	1 orang tenaga Sopir			25,200,000			25,200,000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo	

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT IMMEDIATE / OUTPUT), SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RUMUSAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Peranekat		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
									2019	2020	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.			Target	RP.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	orang	6 Orang Pelaksana Transaksi keuangan	Rp 52.922,400	6 Orang Pelaksana Transaksi keuangan	52.922,400	6 Orang Pelaksana Transaksi keuangan	57,120,000	6 Orang Pelaksana Transaksi keuangan	57,120,000	6 Orang Pelaksana Transaksi keuangan	57,120,000	6 Orang Pelaksana Transaksi keuangan	57,120,000	6 Orang Pelaksana Transaksi keuangan	57,120,000	24	57,120,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
							Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	orang	6 Orang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp 5.529,600	6 Orang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	5.529,600	6 Orang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	5,500,000	6 Orang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	6,050,000	6 Orang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	6,655,000	6 Orang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	7,320,500	6 Orang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	8,052,550		8,052,550	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
							Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Non ASN	orang	6 Orang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp 7.848,000	6 Orang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	8.632,800	6 Orang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	362,880	6 Orang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	399,168	6 Orang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	439,085	6 Orang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	482,993	6 Orang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	531,293		531,293	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	Jumlah realisasi Belanja Administrasi Umum/Jumlah Anggaran Belanja Administrasi Umum kali 100		%					100,00	205,026,455	100,00	253,533,873	100,00	278,887,260	100,00	269,477,489	100,00	233,457,072		233,457,072	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Cakupan Layanan Instalasi Penerangan Bangunan Kantor/Jumlah Anggaran kali 100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	108 titik	Rp 7.999,700	108 titik	7.999,700	108 titik	7,998,500	108 titik	8,798,350	108 titik	9,678,185	108 titik	10,646,004	108 titik	10,646,000		10,646,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket						67,111,580		85,540,510		94,094,561		94,055,520		89,811,072		89,811,072	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Cakupan Layanan Peralatan Kantor/Jumlah Realisasi Anggaran kali 100	Penyediaan Alat Tulis Kantor	paket	12 Bulan	Rp 30,000,000	12 Bulan	32,353,000	12 Bulan	25,844,100	12 Bulan	28,428,510	12 Bulan	31,271,361	12 Bulan	31,000,000	12 Bulan	29,000,000		29,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Penyediaan Bahan Isitabung Gas			Penyediaan Bahan Isitabung Gas	paket	12 isi ulang LPG	Rp 1,914,000	12 isi ulang LPG	2,105,400	12 isi ulang LPG	1,920,000	12 isi ulang LPG	2,112,000	12 isi ulang LPG	2,323,200	12 isi ulang LPG	2,555,520	12 isi ulang LPG	2,811,072		2,811,072	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	paket	12 Bulan	Rp 20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	19,138,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	27,500,000	12 Bulan	27,500,000	12 Bulan	25,000,000		25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	paket	12 Bulan	Rp 9,467,000	12 Bulan	9,467,000	12 Bulan	10,851,480	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	16,500,000	12 Bulan	16,500,000	12 Bulan	16,500,000		16,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kant			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kant	paket	12 Bulan	Rp 10,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	9,358,000	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	16,500,000	12 Bulan	16,500,000	12 Bulan	16,500,000		16,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan/Jumlah Realisasi Anggaran kali 100	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	paket	200 meter cetak banner dan Cetak lainnya	Rp 30,000,000	200 meter cetak banner dan Cetak lainnya	30,000,000	200 meter cetak banner dan Cetak lainnya	30,371,375	200 meter cetak banner dan Cetak lainnya	33,408,513	200 meter cetak banner dan Cetak lainnya	36,749,364	200 meter cetak banner dan Cetak lainnya	40,424,300	200 meter cetak banner dan Cetak lainnya	40,000,000		40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan/Realisasi Anggaran kali 100	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	paket	3x365 harian Jawa Pos, Suara Merdeka, Wonosobo Ekspres	Rp 12,870,000	3x365 harian Jawa Pos, Suara Merdeka, Wonosobo Ekspres	13,000,000	3x365 harian Jawa Pos, Suara Merdeka, Wonosobo Ekspres	12,870,000	3x365 harian Jawa Pos, Suara Merdeka, Wonosobo Ekspres	18,000,000	3x365 harian Jawa Pos, Suara Merdeka, Wonosobo Ekspres	19,800,000	3x365 harian Jawa Pos, Suara Merdeka, Wonosobo Ekspres	21,780,000	3x365 harian Jawa Pos, Suara Merdeka, Wonosobo Ekspres	21,000,000		21,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD/Realisasi Anggaran kali 100		paket	12 bulan	Rp 24,395,000	12 bulan	26,834,500		86,675,000		107,786,500		118,565,150		102,571,665		72,000,000		72,000,000		

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME IMMEDIATE / OUTPUT), SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RUMUSAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Peranekat		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp						
									2019	2020	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.			Target	RP.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							Penyediaan makanan dan minuman	paket	12 bulan	Rp 24,395,000	12 bulan	26,834,500	12 bulan	20,715,000	12 bulan	22,786,500	12 bulan	25,065,150	12 bulan	27,571,665	12 bulan	27,000,000		27,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo		
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	kali	6 kali	Rp 50,000,000	6 kali	60,000,000	6 kali	65,960,000	6 kali	85,000,000	6 kali	93,500,000	6 kali	75,000,000	6 kali	45,000,000		45,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	(Jumlah realisasi anggaran belanja pelayanan administrasi dibagi pagu anggaran) kali 100%		%					100.00	10,000,000	100.00	320,000,000	100.00	30,000,000	100.00	15,000,000	100.00	25,000,000	100		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		unit							3	188,000,000			1	15,000,000					Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo		
							Pengadaan Komputer/Laptop/Printer	unit			5 unit					3	150,000,000			1	15,000,000					Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo	
							Pengadaan Perlengkapan Kantor									1	38,000,000										Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
							Pengadaan Proyektr				2 unit	20,000,000															Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
							Pengadaan Sound System				1 paket																Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
							Pengadaan alat studio																				Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel		unit			1 paket		1	10,000,000	33	132,000,000	22	30,000,000	-	-	2	25,000,000	-		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo		
							Pengadaan Mebelair	unit			1 paket		1	10,000,000	5	102,000,000	2.00	20,000,000			2.00	25,000,000				Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo	
							Almari Arsip				2 unit	5,000,000			8	20,000,000											Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
							Box Kontainer Arsip				10 buah				20	10,000,000	20	10,000,000									Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Pengadaan kendaraan layanan keliling (saran dan liputan)	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor roda 4	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor roda 4	Pengadaan mobil layanan keliling untuk siaran dan liputan	unit			1 unit	700,000,000															Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100.00	116,643,340	100.00	311,141,924	100.00	284,523,376	100.00	167,397,939	100.00	154,157,649	100	154,157,649	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo		
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	paket	1 unit	Rp 100,000,000	1 unit	5,799,753	1 unit		1 unit	100,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo	
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	paket	9 kendaraan roda dua, 2 kendaraan roda 4	Rp 100,000,000	9 kendaraan roda dua, 2 kendaraan roda 4	99,000,000	9 kendaraan roda dua, 2 kendaraan roda 4	70,989,000	9 kendaraan roda dua, 2 kendaraan roda 4	78,087,900	9 kendaraan roda dua, 2 kendaraan roda 4	85,896,690	9 kendaraan roda dua, 2 kendaraan roda 4	77,397,939	9 kendaraan roda dua, 2 kendaraan roda 4	70,000,000	9 kendaraan roda dua, 2 kendaraan roda 4	70,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Wonosobo		



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra DisKomunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 - 2026, maka dalam penyusunannya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan DisKomunikasi dan Informatika yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, DisKomunikasi dan Informatika selaku perangkat daerah pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, statistik dan Persandian berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Bidang Urusan Pemerintah Daerah**

No.	Program	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Target Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	indeks	2,94	2,94	2,98	2,99	3,0	3,01	3,02	3,02
		Nilai kebijakan internal SPBE	nilai	3,06	3,06	3,20	3,30	3,40	3,60	3,70	3,70
		Nilai tata kelola SPBE	nilai	2,7	2,7	2,8	2,9	3,0	3,2	3,3	3,3
		Nilai manajemen SPBE	nilai	00	00	2,45	2,55	2,65	2,82	2,91	2,91
		Nilai layanan SPBE	nilai	3,09	3,09	3,14	3,36	3,33	3,45	3,51	3,51
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data sektoral	%	65	70	75	80	85	90	95	95

3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Index KAMI	angka	<b>177</b>	200	250	300	350	400	450	450
---	---------------------------------------------------------------	------------	-------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan jangka menengah lima tahunan, yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk dievaluasi melalui LKJIP Tahunan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan yang dijadikan acuan pelaksanaan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika,. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari akuntabilitas dari penjabaran RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan diharapkan Renstra tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman bagi pimpinan dan stakeholder lainnya dalam penyusunan program dan kegiatan serta penetapan kinerja tahunan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026 yang konsisten dan berkomitmen serta bertanggung jawab.

Renstra ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara optimal kepada masyarakat maupun elemen lainya terhadap program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya dalam hal urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo ini dibuat untuk menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama lima tahun kedepan.